

**SKRIPSI**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI COVID 19 DI  
DESA O'O KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU**



**OLEH :**

**TRISNO**  
**NIM : 218130073**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI**  
**COVID-19 DI DESA O'O KECAMATAN DOMPU KABUPATEN**  
**DOMPU**



Disusun dan Diajukan Oleh :

**TRISNO**  
**NIM.218130073**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi  
Mataram, 08 Februari 2022

**Pembimbing I**

Drs. Amil, M.M  
NIDN. 0831126204

**Pembimbing II**

M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP  
NIDN.0804049501

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Ayuhajiadi, S.IP., M.IP  
NIDN.0816057902

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI  
COVID-19 DI DESA O'O KECAMATAN DUMPU KABUPATEN**

**DUMPU**



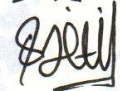
Oleh :

**TRISNO**

**NIM.218130073**

Telah Dipertahankan Didepan Penguji  
Pada Tanggal 08 Februari 2022  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

**Tim Penguji,**

- |   |    |  |
|---|----|--|
| 1. <u>Drs. Amil, M.M</u><br>NIDN. 0831126204                | PU | (  )   |
| 2. <u>M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP</u><br>NIDN.0804049501 | PP | (  )  |
| 3. <u>Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si</u><br>NIDN.0815118302     | PN | (  ) |

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : TRISNO

Nim : 218130073

Alamat : Dusun O'o Barat kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

Memang benar skripsi yang Berjudul Strategi pemerintah desa dalam pelayanan bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi covid 19 di Desa O'o kecamatan dompu kabupaten dompu adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 08 Februari 2022

Ya \_\_\_\_\_ ataan,



TRISNO

NIM.21813007





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT  
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.ljb.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRISNO  
NIM : 210130073  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 25-03-1998  
Program Studi : Idris pemerintahan  
Fakultas : F.I.S.I.Pol  
No. Hp : 085 333 177 607  
Email : trsnotrsnog11@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa O'o Kecamatan Dampu Kabupaten Dampu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 03-Maret.....2022  
Penulis



TRISNO  
NIM.  
210130073

\*pilih salah satu yang sesuai

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRISNO  
NIM : 218130073  
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 25-03-1998  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 085 333 147 601  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di masa Pandemi covid-19 Di Desa 06 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 03 maret .....2022  
Penulis



TRISNO  
NIM. 218130073

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTO

**“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”**

**(QS.Ar Ra'd :11)**

**(TRISNO/Penulis)**





## PERSEMBAHAN :

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikanku kekuatan,
- membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
- Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Mustamin Sa'abe dan ibunda tersayang Sadaria yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama peneliti menjalankan proses akademik sampai pada penyusunan Skripsi ini.
- Kepada keluarga saya tercinta dan anggota FKMOD yang telah menyemangati saya selama proses menginjak dunia akademi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dosen yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi mulai dari awal sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak sepenuhnya sempurna

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu**” skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Selaku ketua Prodi Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, M.M, Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP.,M.AP Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang Tua Tercinta, yang selaku memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini.

7. Para dosen yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan yang membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan.

Mataram, 06 Januari 2022





## ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan, Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah wabah covid 19 yaitu pemerintah menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimana masyarakat yang terdampak wabah ini di berikan bantuan berupa uang sebesar Rp.600.000.

Penelitian ini di lakukan di Desa O'o Kecamatan Dompu kabupaten Dompu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.

Metode yang di gunakan peneliti ini adalah deskriptif kualitatif, dan tehnik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang terjadi dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa O'o.

Keberhasilan strategi pemerintah Desa dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh pemerintah Desa O'o , di tentukan oleh beberapa variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Andrew, 2015: 25, Tahapan demi terwujudnya suatu strategi ada empat variabel yaitu : (1) tahap perumusan, (2) tahap pemutusan, (3) tahap pelaksanaan, (4) tahap penilaian. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi strategi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat dalam situasi pandemi covid 19 sudah berjalan maksimal dilihat dari ke aktifan pemerintah desa serta membentuk tim khusus dalam mencari masyarakat yang berhak mendapatkan BLT. faktor penghambat dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat dalam situasi pandemi covid 19 adalah terbatasnya penerimaan BLT.

**Kata kunci : Srategi, pelayanan dan BLT**

## ABSTRACT

Indonesia is a growing country with abundant natural resources to help it prosper and lift its people out of poverty. The government's implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program provides cash assistance of Rp. 600,000 people affected by the COVID-19 outbreak is one of the special programs issued by the government in the context of accelerating poverty alleviation during the COVID-19 outbreak. The investigation took place in O'o Village, Dompu District, Dompu Regency. In O'o Village, Dompu District, Dompu Regency, this study aims to determine the village government's strategy for providing direct cash assistance (BLT) during the Covid 19 pandemic. This researcher employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques such as observation and interviews and documentation studies. This sort of study aims to describe the picture painted by the Village Government's Cash Direct Assistance Services (BLT) Strategy in O'o Village during the Covid 19 Pandemic. Several criteria impact the success of the Village government's strategy in the Cash Direct Assistance Service provided by the O'o Village government. According to Andrew, 2015: 25, there are four steps in the realization of a strategy: (1) the formulation stage, (2) the termination stage, (3) the implementation stage, and (4) the assessment stage. Each of these factors has a relationship with the others. The village government's strategy in providing BLT services to the community in a situation where the COVID-19 pandemic has been running optimally, judging by the village government's activity and forming a special team to find people entitled BLT, are among the aspects studied in the outline. The restricted reception of BLT in the COVID-19 pandemic situation impedes providing BLT services to the community.

**Keywords:** Strategy, service and BLT

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
UNIVERSITAS ISLAM MAJALINGGA  
KEMAHAMMADIAN MATARAM  
KEPALA  
LPT P3B  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori .....	13
2.2.1 Pengertian Strategi .....	13
2.2.2 Pemerintah Desa .....	14
2.2.3.Konsep Bantuan Langsung Tunai .....	17
2.2.4. Gambaran Bantuan Langsung Tunai .....	18
2.3 Kerangka Berpikir .....	24



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	25
3.3 Teknik Penentuan Informen .....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1 Sejarah Desa O'o.....	31
4.1.2 Keadaan Geografis Desa.....	33
4.1.3 Demografi Desa .....	34
4.1.4 Keadaan Ekonomi .....	35
4.1.5 Keadaan Sosial .....	35
4.1.6 Keadaan Pemerintahan Desa O'o.....	37
4.1.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa O'o .....	38
4.2 Strategi Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan BLT kepada Masyarakat dalam Situasi Pandemi Covid 19.....	40
4.3 Faktor Penghambat dalam Memberikan Pelayanan BLT kepada Masyarakat dalam Situasi Pandemi Covid 19 .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan tahap perumusan dalam pembagian BLT .....	41
Gambar 4.2 Kegiatan pemutusan dalam pembagian BLT .....	42
Gambar 4.3 Kegiatan pelaksanaan dalam pembagian BLT .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terahulu .....	11
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Kepala Desa O’o Dari Tahun Ke Tahun .....	32
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa O’o Tahun 2017 .....	34
Tabel 4.3 Proporsi sumber mata pencaharian masyarakat Desa O’o .....	35
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa O’o .....	36
Tabel 4.5 Pembagian wilayah Desa O’o berdasarkan Dusun .....	37
Tabel 4.6 Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa O’o Untuk Bulan Desember Tahun 2021 .....	45



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan telah menjadi fenomena yang melekat dalam kehidupan negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terkecuali, sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan negara dan masyarakatnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Hal ini membuat kemiskinan di Indonesia semakin rumit setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang masih dihadapi beberapa negara di dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai. Bantuan langsung tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (uang tunai) kepada masyarakat miskin yang terkena dampak wabah COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam nasional.

Masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari

pekerjaan yang mereka miliki untuk mendapatkan uang yang cukup untuk hidup.

memenuhi kebutuhan seseorang. Kemiskinan adalah keadaan tidak memiliki kekayaan, pendapatan rendah, dan kekurangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di tengah wabah COVID-19 adalah pemerintah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana masyarakat yang terkena dampak wabah ini diberikan bantuan tunai sebesar Rp. 600.000 dengan jangka waktu tiga bulan dan target pemerintah. untuk 5,8 juta orang Indonesia. (Regina Wowiling, 2020:1)

Dalam melihat situasi ini, beberapa faktor, baik di dalam maupun di luar hubungan keluarga, dapat dibedakan. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang mendukung upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam suatu perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang paling penting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan ekonomi dapat berjalan.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Definisi kemiskinan seringkali menjadi topik perdebatan berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor dan peneliti daerah seringkali memiliki perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Orang dikatakan tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dan kegiatan terkait. Sedangkan menurut Emil Salim, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan jika penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti pangan, sandang, papan dan lain-lain. Melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program bantuan bagi masyarakat miskin. Program bantuan tunai langsung di tengah pandemi COVID-19 dilakukan karena wabah COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam nasional telah dirasakan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat pedesaan, dimana program bantuan langsung tunai ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi virus corona.

Dana bantuan sosial dalam bentuk BLT ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak wabah COVID-19, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan masyarakat desa. Atau dengan kata lain, program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang muncul dapat menyebabkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka karena



perubahan sosial, sehingga berbagai bantuan diberikan seperti dana kompensasi berupa bantuan tunai langsung kepada rumah tangga miskin. Penyaluran dana santunan diupayakan merata di setiap kecamatan berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ditengah wabah covid 19 ini, peran pemerintah desa sangat di butuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah Covid 19 ini yaitu: Pertama, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah, Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid 19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidak jelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid 19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di Desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat Desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan Desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerjasama antar Desa.

Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu desa yang tercepat memberikan BLT kepada masyarakat. Bahkan, Desa ini berada diperingkat kedua bersama Desa Dorokobo sebagai desa tercepat menyalurkan bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid 19 tersebut. Kami terus berusaha memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Alhamdulillah, BLT tahap I sudah kami salurkan kepada 150 KPM," jelas Kepala Desa O'o, Wawan Wiranto pada. Kades berupaya akan terus memberikan pelayanan cepat. Salah satunya dengan mempercepat mencairkan dana BLT untuk tahap berikutnya. Dalam waktu dekat BLT Tahap kedua akan kembali kami bagikan kepada masyarakat, ungkap kades. Tidak hanya BLT yang dipercepat, namun sejumlah kegiatan lain seperti, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Akan digenjut. Sehingga, sejumlah program tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini menjadi sebuah komitmen kami agar pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik, ujarnya. Sementara itu, proses pembagian BLT tahap pertama Desa O'o berjalan lancar. Pelayanan cepat Pemdes O'o mendapat apresiasi warga karena mengingat kondisi warga desa O'o yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Ada beberapa masalah yang perlu diteliti dari bantuan langsung tunai (BLT) :



1. Program bantuan yang belum valid dan lambatnya proses penyaluran KPM perluasan.

Hal ini dapat dilihat dari indikasi data KPM (keluarga penerima manfaat) perluasan yang tak tepat, tak valid atau tak dimutakhirkan dari data yang diperoleh masyarakat penerima KPM sebanyak 150 KPM. Padahal, menurut aturan, daerah harusnya memutakhirkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tiap tiga bulan sekali. (Nining Nurafiani) Di samping itu, ketika KPM reguler mencairkan bantuan pada April, KPM perluasan baru menerima pencairan bantuan pada Mei.

2. Penerimaan bantuan yang dilakukan pemerintah desa juga tak lazim.

KPM program keluarga harapan dan program sembako perluasan ditetapkan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang diberikan ke dinas sosial dan pelaksanaan program di daerah serta bank penyalur dan aplikasi e-PKH.

Padahal, biasanya verifikasi data dan validasi dilakukan sebelum penentuan KPM. Sebelum penentuan KPM akan ada proses data cleansing, pembukaan rekening kolektif di bank penyalur, dan pencetakan kartu kesejahteraan sosial (KKS). “karena waktu terbatas dan pandemi, verifikasi dan validasi KPM perluasan digelar setelah semua kegiatan. Verifikasi dan validasi terutama hanya untuk melihat kesesuaian data dengan dokumen kependudukan KPM,”

Adapun maksud dan tujuan saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima bantuan

langsung tunai (BLT) Jika masalah ini tidak diteliti maka kecurangan, pungutan liar serta kerugian dari masyarakat penerima manfaat semakin meningkat. Dengan demikian pemerintah juga gagal dalam membuat masyarakat sejahtera serta menuntaskan kemiskinan ekonomi di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Adapun penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan tema :

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA O'O KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat dalam situasi pandemi covid 19?
2. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat dalam situasi pandemi covid 19 ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pelayanan BLT kepada masyarakat dalam situasi pandemi Covid 19

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam memberikan pelayanan BLT untuk warga dalam situasi pandemi Covid 19

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, memberikan pengalaman dan informasi modern kepada Bagian Ilmu Pemerintahan, Tenaga Kerja Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan yang dapat diandalkan untuk mendorong pemikiran terkait metodologi pemerintah dalam penyelenggaraan BLT di tengah merebaknya COVID-19 dan sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong.
3. Dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah metodologi pemerintah kota dalam penyelenggaraan BLT, khususnya di wilayah kabupaten dompu

##### **1.4.2 Manfaat Akademik**

Secara skolastik, susunan penelitian ini dipercaya dapat memberikan manfaat lanjutan:



1. Munculnya pertimbangan ini diharapkan dapat memenuhi salah satu kebutuhan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Bagian Ilmu Pemerintahan, Staf Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram.
2. Analisis dapat memasukkan pemahaman dengan menerapkan informasi yang telah diperoleh secara hipotetis di lapangan.
3. Bagi analisis lain, dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan atau penelitian yang sama. Agar pembaca mengetahui tata cara Pemkot dalam penyelenggaraan BLT di tengah merebaknya Covid 19.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terahulu

No	Penulis & tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Arifin , 2014	Pembangunan dan problem sosial di perkotaan analisis problem kemiskinan masyarakat wonokromo sebagai dampak pembangunan kota Surabaya	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya kepentingan ekonomi dalam setiap pembangunan di wilayah kota surabaya. Hal ini di sebabkan antara lain: a) .upaya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, b) Lokasi atau lahan sangat strategis untuk kepentingan ekonomi investor, c) Kebijakan pembangunan yang di terapkan tidak disertai partisipasi warga dalam perumusan kebutuhan (2) Problem kemiskinan yang timbul adalah akibat dari ketidaksamaan dalam penguasaan asset produksi, akses an informasi kerja, minimnya fasilitas kesehatan, dan keharmonisan.	Dari penelitian ini ekonomi masyarakat Desa O'o sangat-sangat menurun akibat adanya wabah Covid 19 sehingga mata pencarian mereka terbatas.
2.	Iqbal, 2013	Implementasi program bantuan langsung tunai tahun 2008 di kabupaten kebijakan kudas	Hasil pengamatan di lapangan merupakan: (1) Sosialisasi ini sudah melaksanakan dengan tepat hingga sampai kecamatan, namun ini kurang yang menindaklanjuti dengan diadakan sosialisasi sampai desa/kelurahan, (2) Verifikasi data nominasi RTS kurang sejalan dengan	Dari penelitian ini menunjukan bahwa di Desa O'o masih belum sepenuhnya melakukan sosialisasi bagi masyarakat yg kurang mampu sehingga datanya

			mestinya, beberapa 52 desa akan melaksanakan aturan ini.	belum sampai di pusat.
3	Regina Wowling (2020)	Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat dimasa pandemi covid-19 di kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa di Kecamatan Maesaan dalam penyaluran BLT dari pemerintah sangat tidak baik, yang dilihat dari banyaknya penerima BLT merupakan orang yang tidak pantas mendapatkannya.	Dalam penelitian sekarang menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pelayanan BLT belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat yg berhak mendapatkannya.
4	Risnandar & Aditya Wisnu Brotu, 2018.	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia. (Jenderal, Fakir, Sosial, & Indonesia, 2018)	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia. (Jenderal, Fakir, Sosial, & Indonesia, 2018)	Dari permasalahan penelitian yang belum tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan demikian di nusa tenggara barat juga masih banyak yang saya jumpai sering tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan menjadi acuan kita untuk melakukan penelitian,
5	Marini, 2012	Dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat msikin di desa perawang barat kecamatan tulang kabupaten siak	Hasil penelitian menunjukkan bahwasan-bahwasannya 75 responden akan didapatkan BLT ini nyatanya hanya 21 responden benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 respoden yang lain adalah respoden yang tidak layak akan mendapatkan BLT tersebut.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa tokoh masyarakat penerima BLT sebagai responden dalam penelitian ini.



## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Strategi

Menurut Andrew (2015:19), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis.

Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2015: 25)

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

- b. Tahap pemutusan. Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c. Tahap Pelaksanaan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk
- d. pencapaian tujuan
- e. Tahap Penilaian. Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya

Menurut Chandler (dalam Kuncoro 2016:21), strategi adalah menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, melaksanakan tindakan, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Iman Mulyana (2010:45), Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu : kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa diastuka secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional.

### **2.2.2 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa melaksanakan Tugas Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa.

Menurut Juliantara (2007:18), pengertian desa dari perspektif sosial budaya dapat dipahami sebagai suatu komunitas dalam satu kesatuan geografis tertentu, mereka saling memahami dan gaya hidup mereka relatif homogen, banyak orang yang secara langsung bergantung pada alam. Oleh karena itu, desa dianggap sebagai masyarakat sederhana yang hidup di sektor pertanian, dengan ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, rendah hati, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Bintarto (dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir 2007:8), yang melihat desa dari perspektif geografis, desa didefinisikan sebagai perwujudan dari sekelompok manusia dan kegiatan lingkungannya. Hasil percampuran tersebut merupakan bentuk atau kenampakan unsur-unsur geomorfik, sosial-ekonomi, politik, dan budaya di muka bumi yang berinteraksi antara unsur-unsur tersebut dan dengan wilayah lain.



Desa merupakan organisasi Pemerintahan terendah yang langsung di bawah Camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian Desa menjadi sumber utama dan pertama dari berbagai data dan keterangan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka dasar penyusunan rencana pembangunan Daerah maupun Nasional. Desa memberikan pelayanan, bantuan dan melaksanakan berbagai urusan pada tahap masyarakat. Oleh karena itu administrasi desa harus disesuaikan dengan kebutuhan semua perangkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sejumlah register harus dikelola oleh desa selama masih mengenai hal yang umum, misalnya penduduk, luas tanah dan sebagainya. Dari pengertian yang dijelaskan dengan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah desa, unsur tersebut yaitu: Wilayah, Penduduk dan Pemerintahan Desa. Ketiga unsur tersebut harus ditunjang dengan adanya sarana bagi desa yang cukup memadai. Menurut peraturan pemerintah, tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi.

- 1) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat,
- 3) Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh anggota masyarakat,

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa yakni mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun pembangunan secara umum.

### **2.2.3 Konsep Bantuan Langsung Tunai**

BLT dicirikan sebagai program balas jasa jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tujuan utamanya untuk membantu masyarakat miskin, lebih tepatnya untuk membantu keluarga tidak mampu, karena dampak Covid 19 sangat tidak aman (Wibawa, 2009: 76).

BLT bisa menjadi pengaturan tunjangan jangka pendek untuk tingkat pemanfaatan keluarga sasaran. Keluarga termasuk sangat melarat-melarat, dan sangat miskin dapat memiliki keluarga miskin di bawah pengaruh Covid 19. Oleh karena itu, meskipun rencana BLT bukanlah rencana yang tertarik untuk memecahkan masalah kemiskinan, namun diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ketika biaya kebutuhan masyarakat meningkat hingga mencapai penyesuaian modern (Tangkilisan, 2010: 65).

BLT diberikan secara langsung kepada keluarga termasuk dalam situasi tidak mampu, dan BLT disalurkan terhadap keluarga binaan dalam bentuk Rp dalam waktu tiga bulan. 600.000 rupee, 300.000 rupee bulan depan. Tujuan BLT bertujuan mengurangi beban warga yang tidak mampu agar dapat meminilisir keperluan pokok mereka, dan untuk menahan jatuhnya kehidupan atau kesejahteraan orang miskin yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan

berbagi tanggung jawab sosial. Pemerintah berharap penerima BLT dapat dan dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **2.2.4. Gambaran Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Tunai Bantuan Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan anggaran kepada keluarga kurang mampu di dalam kota yang bersumber dari Bantuan Kota untuk mengurangi dampak penyebaran Covid 19. Besaran BLT Bantuan Kota sebesar Rp 600.000 per bulan untuk setiap keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan selama tiga bulan berikutnya. BLT Dukungan Kota ini tidak dipungut biaya

##### **1) Kriteria calon penerima BLT**

Penerima manfaat yang direncanakan BLT Bantuan Kota adalah keluarga tidak mampu, baik yang tercatat dalam Koordinat Informasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak tercatat (kesalahan larangan) yang memenuhi kriteria pengambilan setelah:

- a. Belum mendapat bantuan dari pemegang PKH/BPNT/Kartu Prakerja;
- b. Menghadapi kemalangan pekerjaan (tidak memiliki tabungan keuangan yang memadai untuk hidup lebih lama selama tiga bulan berikutnya);
- c. Memiliki individu keluarga yang cenderung menderita penyakit menahun/kronis.



## 2) Aturan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PMK No.222 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp.300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas Tahun 2021 perkeluarga penerima manfaat (KPM).

## 3) Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BLT

Pelaksanaan program BLT merupakan Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan Anggaran membantu oleh pihak-pihak terikat pada yang telah ditentukan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan program. Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Sosialisasi BLT kepada unit-unit Keluarga Sasaran dapat menjadi suatu bentuk kebangkitan pelaksanaan berdasarkan kapasitas dan kewajiban pokok masing-masing, dengan pendidikan yang mampu untuk kelancaran kewajiban khususnya. Dalam kerjasama ini direncanakan akan mempercepat metode penyebaran cadangan BLT kepada KK binaan kumpul agar pemanfaatannya lebih maksimal. Pada tingkat kerjasama layanan yang ideal, masing-masing institusi saling memberikan data dan dalam program BLT didorong penyusunan Unit Penggunaan Program BLT. Tugas dan kewajiban paling banyak dari masing-masing lembaga dapat dilihat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Program BLT di Unit Keluarga Sasaran yang dapat dilihat setelah:

a. Departmen Sosial

Departmen sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan Surat perintah kepada Pos Indonesia untuk dibayar dana BLT pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominatif penerima BLT yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departmen sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran BLT bersama 40 Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero) Tbk. Dimana tanggung jawab pada pemerintah, Departmen sosial wajib dibuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana BLT Kepada presiden RI.

b. Komitmen PT Pos Indonesia dalam program BLT ini dalam rangka mengimbangi berkurangnya dana abadi BBM adalah dengan menyimpan rekening Giro terbanyak di Bank Departemen Veteran Indonesia. Berdasarkan anggaran dari Dinas Sosial yang dapat disalurkan ke rekening giro. Pos Tempat Kerja mencetak dan menyampaikan Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke KRPK (Pos Kerja Pemerintah) di seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominatif, kemudian KRPK Menyampaikan KKB kepada unit Keluarga Sasaran bekerja sama dengan pemerintah kota lingkungan, TKSM (pekerja kesejahteraan sosial masyarakat ) dan kekuatan keamanan dan

kekuatan keamanan diperlukan. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga dapat melaporkan realisasi penggunaan KKB tersebut ke Kementerian Sosial dan setelah itu menghasilkan pengaturan sosialisasi toko BLT.

c. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam perencanaan permodalan BLT. PT Pos Indonesia dan BRI dapat dibebaskan dari cadangan otoritatif untuk pembukaan rekening dan dipisahkan dari komitmen toko awal untuk pemeriksaan toko permintaan di Kantor Camat Veteran BRI Jakarta dan Kantor Departemen BRI di seluruh Indonesia. Untuk keperluan tata cara penyampaian dan penyelenggaraan BLT, BRI diberikan kemudahan kepada PT Pos Indonesia untuk melakukan penukaran toko dari rekening Giro Tempat Kerja Pos seluruh Indonesia. Sebagai wujud komitmen dan kewajiban, BRI dapat menghasilkan dana hasil perubahan giro terbaru dari Giro Kantor Pos melalui manfaat administrasi kas BRI.

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan bagian dan berkomitmen untuk memberikan data tentang KK binaan penerima BLT yang tergolong KK sangat tidak mampu dan KK miskin. Untuk itu, mengingat data dilakukan dengan informasi terkini di lapangan, BPS dapat memiliki komitmen untuk membuat laporan pelaksanaan program BLT dengan memahami komitmen dan kemampuan yang akan dimiliki.



e. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi

Di tingkat dinas/lembaga sosial umum, dalam penanganan program BLT, wajib dilakukan pengendalian terhadap unit penggunaan BLT di tingkat umum dan struktur pelaksanaannya. Pengarahan, pengawasan dan pengawasan dilakukan terhadap penggunaan BLT, menghitung satuan pelaksana program BLT di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Dapat pula memfasilitasi dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk pelaksanaan perluasan ke kantor pos pada saat penyampaian BLT dengan menyertakan ahli kesejahteraan sosial masyarakat.

f. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Di tingkat dinas sosial kabupaten/kota atau pengajar, penyiapan alat angkut BLT memiliki bagian dan komitmen dalam membuat unit pelaksana program BLT dan posisi yang terlibat dalam struktur organisasi melakukan sosialisasi BLT. Orang-orang yang disebutkan oleh pihak berwenang di halaman manfaat sosial yang menjaga perhatian serius selama proses pelaksanaan program Bantuan Koordinasi uang.

g. Kewajiban Kecamatan (Camat)

Mengawasi UUP BLT di tingkat kecamatan. Diperiksa oleh antek-antek di tingkat kecamatan/desa/kelurahan yang idealnya bisa diikutsertakan dalam sosialisasi kartu BLT dan sosialisasi toko BLT agar terkendali dan aman di lapangan. Menyelenggarakan sarasehan dengan seluruh pendamping di tingkat kecamatan. Melakukan sosialisasi program BLT kepada RTS dan didukung dengan sosialisasi

kepada masyarakat terbuka. Hal itu dicek petugas pos saat sebaran kartu BLT tepat sasaran, tepatnya RTS. Melaksanakan bantuan dan dibantu petugas pos saat menyerahkan kartu BLT dan angsuran BLT termasuk ahli kesejahteraan sosial masyarakat. Diperiksa penyelesaiannya oleh desa/kelurahan sesuai jenis pengaduan dan tingkat spesialis melalui dinas terkait, masuk manfaat di tingkat kecamatan. Munculnya penggunaan program BLT dibuat secara akurat dan ahlinya dilakukan secara bertahap oleh pihak penting.

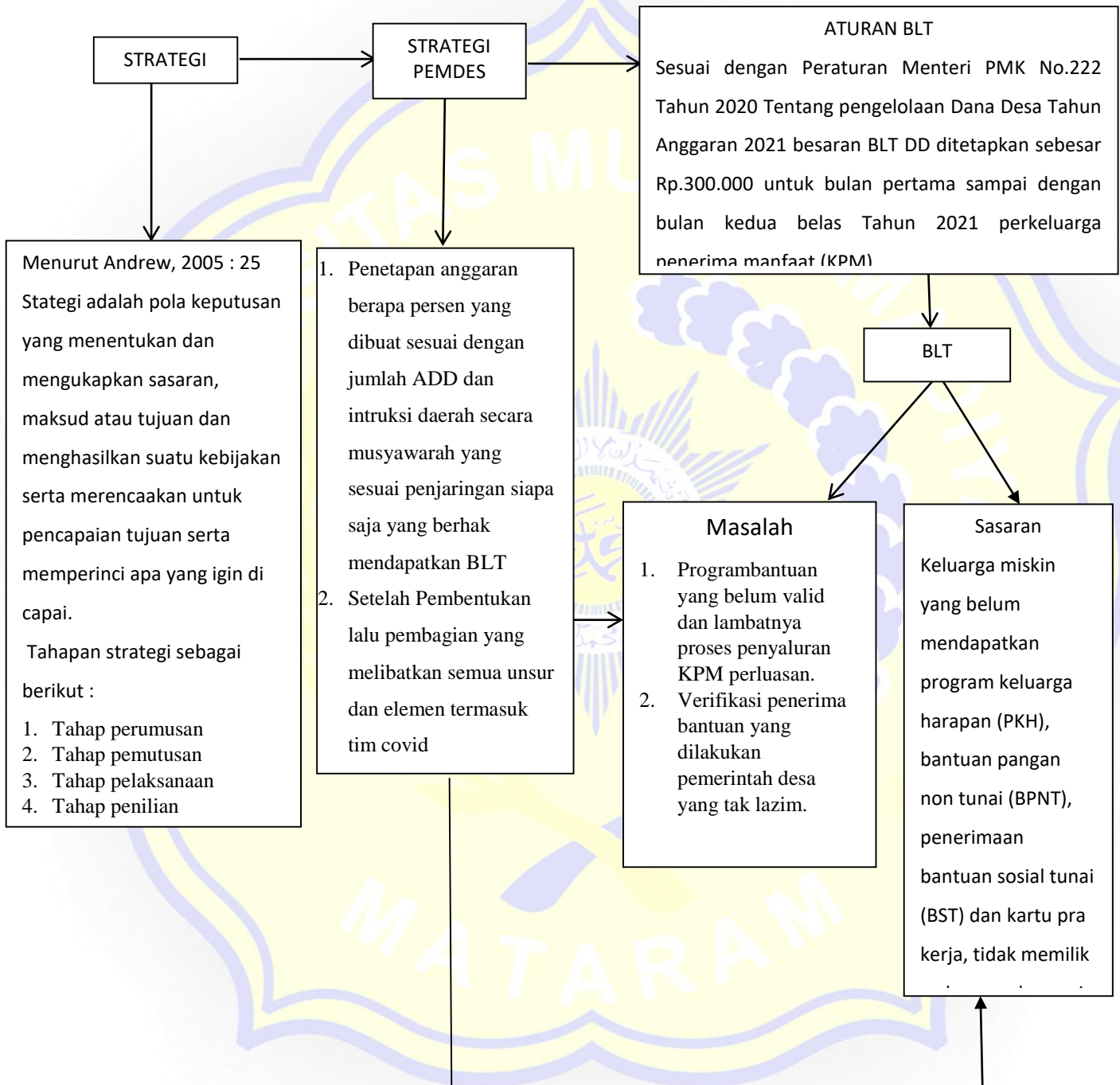
#### h. Kewajiban Desa/Kelurahan

Petugas pos memeriksa pembayaran atau penerima BLT dan sosialisasi kartu ke unit Keluarga Sasaran. Bersama dengan petugas pos, diputuskan siapa pengganti RTS yang pindah/meninggal (tanpa penerima manfaat) atau yang berhak, melalui pertimbangan desa/kelurahan diserahkan kepada kepala desa/kelurahan, RT/RW tempat RTS pengganti tersebut. bermukim, perintis yang taat, perintis masyarakat dan organisasi kepemudaan. Bantuan dilakukan kepada petugas pos saat menyerahkan kartu BLT dan dispersi termasuk para ahli kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan apa yang terjadi (antara lain saat memutuskan RTS, penyebaran kartu dan pengangkutan BLT) sesuai dengan jenis dan tingkat spesialis (Widianto, 2008: 78).

## 2.3 Kerangka Berpikir

### Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelayanan BLT Di Masa Pandemi

#### Covid 19 di Desa O,o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam Sugiono (2018:205) Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan di pecahkan, metode penelitian kualitatif menggunakan fokus group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang cara strategi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan BLT.

#### **3.2 Tempat dan lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini melakukan pada bulan desember tahun 2021 di Desa O'o kecamatan dompu kabupaten dompu nusa tenggara barat.

#### **3.3 Teknik Penentuan Informan**

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono (2018:218) adalah : *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diperlukan, atau

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan antara lain : (1) informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan dan juga mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan diteliti yaitu: kepala Desa O'o dan jajaran kebawahnya maksimal 5 (lima) orang dan membahas terkait dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), (2) informan tambahan, ialah mereka yang dapat memberikan informasi tambahan walaupun tidak ikut langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti seperti keluarga penerima manfaat yang terlibat dalam penerimaan BLT dan membutuhkan 5 (lima) orang informan tambahan dan membahas terkait dengan indikator tepat waktu dan kepuasan keluarga penerima manfaat.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

Data dalam penelitian ini menggunakan yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.
2. Data sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data sekunder dalam penelitian in

adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengampilan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data sekunder sebagai pelengkap.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulam data, maka peneliti tidak akan menapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. (Sugiono 2015:204) observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau observer dan objek yang di observasi atau observer dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung

#### **2. Wawancara**

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono, (2010:72) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar invormasi dan ide melalui Tanya jawab, sehinga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.



Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih mendalam.

### 3. Dokumen

Laporan adalah sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan pemeriksaan. (Sugiono, 2015:329) arsip diselesaikan dengan mencari informasi pendukung yang sesuai dengan topik yang direnungkan. Studi penulisan dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan informasi dalam penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pilihan penting. Strategi ini merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikonsentrasikan sehingga diperoleh informasi yang lengkap, sah, dan tidak bersifat penilaian dengan mengambil informasi yang sudah ada dan dapat diakses dalam arsip arsip. Dokumentasi ini diambil untuk mendapatkan informasi, foto, dan catatan lapangan.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisis Informasi dalam eksplorasi subjektif dilakukan pada saat pengumpulan informasi dan setelah pengumpulan informasi selesai dalam periode tertentu. Pada jam pertemuan, analis telah menyelidiki tanggapan orang yang diwawancarai. Dengan asumsi tanggapan orang yang diwawancarai

dianggap tidak sesuai, analisis akan melanjutkan penyelidikan sekali lagi, sampai tahap tertentu mendapatkan informasi yang dianggap dapat dipercaya.

Sugiono 2015 mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data yaitu:

#### 1. Reduksi data

Pengurangan informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari topik dan contoh. Dengan cara ini informasi yang telah dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan analisis untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan.

#### 2. Penyajian data

Dalam pemeriksaan subyektif, tampilan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, grafik, hubungan antar kelas. Flowchart dan semacamnya, yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam pemeriksaan subjektif adalah teks akun. Dengan menunjukkan informasi, akan lebih jelas apa yang terjadi, rencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang dirasakan.

#### 3. Verifikasi data

Tujuan mendasar yang ditetapkan masih bersifat sementara dan akan berubah dengan asumsi tidak ada bukti kuat yang dilacak yang mendukung fase pengumpulan informasi berikutnya. Meskipun demikian, dengan asumsi bahwa tujuan yang diangkat pada fase awal didukung oleh bukti

yang sah dan dapat diprediksi ketika analisis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka, pada saat itu, tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang dapat dipertahankan.

Berakhir dalam eksplorasi subjektif adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Discoveries dapat berupa penggambaran atau penggambaran suatu barang yang sebenarnya sudah redup atau redup sehingga setelah diteliti ternyata menjadi jelas, cenderung merupakan hubungan sebab akibat atau cerdas, spekulasi atau hipotesis.





